

ABSTRAK

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perusahaan terbuka yang telah menjual sahamnya ke pasar. Sebanyak 51,01% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sisanya dikuasai oleh masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun asing. Saham tersebut setiap tahunnya menghasilkan laba dan membagikan dividen. Pembagian dividen tersebut diatur oleh PT Datindo Entrycom, dan dalam dividen yang dibagikan terdapat pemotongan pajak sesuai pasal yang berlaku dan tarif yang disesuaikan, terutama untuk PPh 26 yang memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) maka dikenakan tarif sesuai tarif *tax treaty*. Sebagai tanda bahwa PPh 23 dan PPh 26 telah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong. Pembuatan bukti potong pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah menggunakan aplikasi e-Bupot yang bertujuan untuk memudahkan proses perpajakan dan memberikan efektivitas dalam bekerja. Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap (BUT) telah dikecualikan dari objek pajak. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan PPh 23 dan PPh 26 atas dividen menggunakan e-Bupot pada PT Semen Indonesia, yang mana hasilnya telah berjalan dengan baik dan sesuai namun masih terdapat beberapa kendala.

Kata kunci: PPh 23, PPh 26, *tax treaty*, dan e-Bupot.